

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan akuntansi sektor publik semakin pesat seiring dengan pelaksanaan otonomi daerah. Pemerintah daerah dituntut untuk mempertanggungjawabkan, mendokumentasikan, menunjukkan, dan mengungkapkan kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab kepada pemberi perintah. Setiap instansi di Indonesia diwajibkan untuk memberikan laporan keuangan kepada pemerintah sebagai salah satu tugasnya. Laporan keuangan yang diberikan harus sesuai dengan ketentuan akuntansi yang berlaku, yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Beberapa pihak yang berkepentingan akan menggunakan laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah daerah sebagai dasar pengambilan keputusan. Laporan keuangan sektor publik perlu memastikan informasi yang relevan kepada semua pengguna dan ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum dari pengguna eksternal (Helden dan Reichard, 2019).

Pembahasan mengenai pentingnya pengambilan keputusan telah dijelaskan di Al-Qur'an Surah Ali-Imran Ayat 159 yang berbunyi:

تَّبِعْمَا رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لَئِنْ لَمْ تُنِيتْ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ
فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى
اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahan: *“Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-Nya.”*

Ayat ini menjelaskan tentang pentingnya sikap lembut dan penuh kasih sayang dalam berinteraksi dengan orang lain, terutama dengan seseorang yang berbeda pendapat atau memiliki pandangan yang berbeda. Ketika mengalami konflik dengan orang lain maka berusaha untuk memaafkan dan memohonkan ampun bagi mereka dan bermusyawarah untuk menemukan solusi yang terbaik. Jika diasumsikan DPRD harus mempertimbangkan sikap lembut dan penuh kasih sayang dalam pengambilan keputusan, maka ayat ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam berinteraksi dan bekerja sama dengan anggota DPRD lainnya. Ini dikarenakan dalam bekerja sama dalam sebuah tim atau organisasi, termasuk DPRD, sikap lembut dan penuh kasih sayang dapat membantu mempererat hubungan antar anggota dan memudahkan proses pengambilan keputusan yang lebih baik.

DPRD merupakan lembaga legislatif di tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang memiliki tugas untuk mengawasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Laporan keuangan dapat digunakan oleh DPRD untuk menganalisis dan mengevaluasi kinerja keuangan pemerintah daerah serta memantau pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, laporan keuangan digunakan DPRD untuk mengetahui seberapa efektif dan efisien pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Dari laporan keuangan, DPRD dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki pengelolaan keuangan daerah dan meningkatkan kinerja pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan keuangan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi pengambil keputusan di pemerintahan daerah (Nogueira *et al.*, 2013).

Fenomena yang melandasi penelitian ini berawal dari Tahun Anggaran (TA) 2022 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DIY mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) DIY, pada Sidang Paripurna Istimewa DPRD DIY. Hal ini berkaitan dengan penyusunan laporan keuangan dengan kualitas yang baik, tidak melakukan kecurangan yang dapat merugikan organisasi, memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola dan menyajikan laporan keuangan daerah. Entitas pemeriksaan pada BPK Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta terdiri atas enam entitas, yaitu Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kota Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten Bantul, Pemerintah Kabupaten Kulon Progo, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, dan Pemerintah Kabupaten Sleman.



Sumber: yogyakarta.bpk.go.id

Gambar 1.1
Grafik Peningkatan Opini Laporan Keuangan

Berdasarkan Gambar 1.1 diatas menunjukkan bahwa hasil dari pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah DIY dari Tahun Anggaran 2018 hingga Tahun Anggaran 2022 mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Pemberian opini wajar tanpa pengecualian dapat memicu semangat dan kontribusi lebih aparatur negara dalam menyusun laporan dengan tepat. Dengan segala pencapaian yang dilakukan untuk mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dengan baik sesuai dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah.

Walaupun sudah ketiga belas kalinya mengantongi opini WTP sejak tahun 2008, laporan keuangan pemerintah daerah DIY masih mendapatkan catatan dari BPK. Salah satu catatan yang diberikan adalah pelaksanaan pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pantai Gesing melampaui tahun anggaran dan realisasi pembayaran melebihi kemajuan fisik pekerjaan, penentuan besaran

tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD belum sesuai dengan ketentuan tentang perhitungan berdasarkan hasil appraisal, dan pemberian paket sembako pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) belum tertib. Nuryadi, selaku ketua DPRD DIY mengungkapkan evaluasi dalam pengelolaan keuangan mesti terus dilakukan. Selain itu, Nuryadi mengatakan pengelolaan keuangan adalah tanggung jawab bersama, terutama sebagai lembaga legislatif seperti DPRD memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengawasi pengelolaan keuangan publik (DPRD, 2023).

Menurut Widhi Widayat, Kepala BPK Perwakilan DIY, Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul memperoleh opini WTP pada tahun 2022 selama sebelas tahun berturut-turut, yang menunjukkan bahwa Kabupaten Bantul telah menunjukkan akuntabilitasnya dalam mengelola keuangan daerah dan penerapan SAKD telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Meskipun demikian, seperti yang dilansir *website* detik.com pada tahun 2023, Kejaksaan Negeri Bantul menetapkan seorang PNS Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) Kabupaten Bantul sebagai tersangka dugaan korupsi pembuatan nota fiktif dana perawatan barang dan jasa pemeliharaan Stadion Sultan Agung (SAA) tahun 2020-2021.

Berdasarkan fenomena diatas, dapat disimpulkan bahwa DPRD DIY menggunakan laporan keuangan untuk pengambilan keputusan pengelolaan keuangan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah DIY. Dalam rangka mengelola keuangan publik, DPRD DIY terdorong untuk meningkatkan akuntabilitas, aksesibilitas, kualitas, dan penyajian laporan keuangan. Namun,

sedikitnya informasi mengenai politisi khususnya DPRD Yogyakarta menggunakan laporan keuangan dapat dipertanyakan, khususnya tentang seberapa bermanfaatnya laporan keuangan untuk mengambil keputusan berdasarkan persepsi pengguna internal laporan keuangan di dalam pemerintahan (Nirmala *et al.*, 2014). Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Helden (2016) yang menyimpulkan bahwa masih menjadi perdebatan dalam literatur akademis mengenai akuntansi sektor publik yang membahas isu-isu seperti apakah para politisi menggunakan informasi akuntansi. Selain itu, laporan keuangan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul sudah berkualitas, namun masih terdapat masalah akuntabilitas yang berkaitan dengan penyajian laporan keuangan yang kurang baik, yang dapat menyebabkan laporan keuangan menjadi kurang berkualitas. Jika anomali terus terjadi, laporan keuangan akan menjadi kurang bermanfaat dan kurang relevan dalam membantu DPRD untuk membuat keputusan yang tepat.

Dalam penelitian yang dilakukan Giacomini *et al.*, (2016) mengatakan bahwa politisi sebagai perwakilan warga negara dan sering kali menjadi pengambil keputusan penting, diharapkan menggunakan informasi akuntansi sektor publik. Menurut penelitian Helden (2016), informasi akuntansi biasanya sangat rumit, terperinci, dan proses pengambilan keputusan tampaknya berpusat pada pertimbangan politik yang tidak mementingkan nilai yang ada pada informasi akuntansi. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan Jethon dan Reichard (2022) yang menunjukkan bahwa politisi di Jerman menganggap

informasi kinerja yang disajikan dalam anggaran pemerintah kurang relevan dan sulit digunakan dalam pengambilan keputusan politik.

Selain literatur yang disebutkan diatas, terdapat beberapa studi tentang ketidaksesuaian informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah dengan kebutuhan penggunanya (Daniels dan Daniels, 1991; Jethon dan Reichard, 2022; Nogueira et al., 2013). Penelitian ini menunjukkan bahwa setiap kelompok pengguna memiliki preferensi informasi yang berbeda dan format laporan keuangan yang berbeda dapat mempengaruhi persepsi pengguna tentang kecukupan informasi, lokasi terbaik untuk informasi, kemampuan untuk menentukan kekuatan keuangan relatif, dan opini keseluruhan tentang laporan keuangan. Hal ini dikarenakan adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kegunaan laporan keuangan, seperti tampilan *interface* dan sistem akuntansi keuangan yang digunakan dalam penyajian laporan keuangan.

Menurut Cardinali (1994) *interface* adalah interaksi antara pengguna akhir (*end-user*) dan komputer. Cardinali juga mengatakan *interface* yang baik dapat memudahkan pengguna mengakses informasi yang ada, sedangkan *interface* yang buruk dapat menyebabkan kebingungan, frustrasi, dan menghambat produktivitas pengguna. Penelitian yang dilakukan oleh McCallig *et al.* (2019) terkait pengembangan desain sistem informasi akuntansi yang akan meningkatkan keakuratan representasi informasi pelaporan keuangan menunjukkan bahwa desain memang dianggap penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan.

Sistem akuntansi yang baik juga menjadi faktor penting dalam mempengaruhi kegunaan laporan keuangan. Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 232 menyebutkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, dan pelaporan keuangan. Penelitian yang dilakukan Fatmawati *et al.* (2021) menemukan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memiliki dampak positif dan kritis terhadap kualitas laporan keuangan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Pujanira dan Taman (2017) penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem akuntansi yang baik dapat membantu dalam menyajikan informasi keuangan dengan akurat dan sistematis. Sebaliknya, sistem akuntansi yang buruk dapat menyebabkan informasi keuangan yang disajikan tidak akurat dan tidak sistematis.

Usefulness financial reporting (kegunaan laporan keuangan) merujuk pada sejauh mana laporan keuangan pemerintah dapat memberikan manfaat bagi pengambil keputusan di pemerintahan daerah. Caruana dan Farrugia (2018) mengungkapkan bahwa laporan keuangan pemerintah digunakan untuk memberikan akuntabilitas dan membantu pengambilan keputusan. Pawłowski (2019) dalam penelitiannya menyimpulkan terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kebermanfaatan laporan keuangan, yaitu kurangnya transparansi dalam penyajian informasi, aturan akuntansi yang kompleks, cakupan informasi yang terbatas, dan rendahnya tingkat detail data.

Berdasarkan fenomena yang terjadi di DPRD Kota Yogyakarta dan literatur yang diuraikan menyebutkan bahwa masih banyak politisi yang tidak memiliki kemampuan yang dibutuhkan untuk menginterpretasikan informasi akuntansi, maka tidak jelas apakah dan bagaimana mereka menggunakannya, khususnya anggota DPRD dalam tanggung jawab dan kewajiban mereka sebagai wakil rakyat. Peneliti melihat masih sedikit penelitian yang meneliti *usefulness financial reporting* di sektor publik, khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk memotivasi sektor publik untuk lebih meningkatkan sistem laporan keuangan dan menguji seberapa penting laporan keuangan bermanfaat untuk pengambilan keputusan. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menambahkan variabel *interface* sebagai variabel independen dimana variabel tersebut jarang diteliti lebih dalam. Kontribusi penelitian ini adalah dengan menambahkan variabel *interface* sebagai variabel independen, variabel *usefulness financial reporting* sebagai variabel mediasi, dan variabel *intention to use financial reporting* sebagai variabel dependen.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut.

1. Apakah *interface* berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap *usefulness financial reporting*?
2. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap *usefulness financial reporting*?

3. Apakah *usefulness financial reporting* berpengaruh positif signifikan secara langsung terhadap *intention to use financial reporting*?
4. Apakah *interface* berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap *intention to use financial reporting* melalui *usefulness financial reporting*?
5. Apakah sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan secara tidak langsung terhadap *intention to use financial reporting* melalui *usefulness financial reporting*?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diperoleh beberapa tujuan penelitian, yaitu sebagai berikut.

1. Untuk menguji secara empiris pengaruh *interface* secara langsung terhadap *usefulness financial reporting*.
2. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah secara langsung terhadap *usefulness financial reporting*.
3. Untuk menguji secara empiris pengaruh *usefulness financial reporting* secara langsung terhadap *intention to use financial reporting*.
4. Untuk menguji secara empiris pengaruh *interface* secara tidak langsung terhadap *intention to use financial reporting* melalui *usefulness financial reporting*.
5. Untuk menguji secara empiris pengaruh sistem akuntansi keuangan daerah secara tidak langsung terhadap *intention to use financial reporting* melalui *usefulness financial reporting*.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, diharapkan dapat menambah literatur pemahaman yang lebih mendalam mengenai variabel-variabel yang mempengaruhi DPRD menggunakan laporan keuangan. Hal ini dapat membantu para profesional dan akademisi menciptakan metode yang lebih praktis untuk meningkatkan penggunaan laporan keuangan.

2. Manfaat Praktisi

- a. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan peneliti mengenai kegunaan laporan keuangan bagi DPRD, selain itu hal ini juga merupakan salah satu persyaratan dalam penyelesaian studi.
- b. Bagi pemerintah, sebagai masukan yang dapat digunakan untuk menggunakan laporan keuangan sebagai pengambil keputusan dan pengawasan terhadap sumber daya publik.
- c. Bagi akademik, dapat digunakan sebagai bahan kajian bagi para akademis dan ilmuwan di perguruan tinggi dan lembaga lainnya untuk kepentingan penelitian.